

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Garis-garis Besar Haluan Negara menyatakan bahwa jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi modal dasar yang efektif bagi pembangunan nasional. Namun dengan pertumbuhan yang pesat sulit untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan secara layak dan merata. Hal ini berarti bahwa penduduk yang besar dengan kualitas yang tinggi tidak akan mudah untuk dicapai.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan kalau 10 provinsi di Indonesia mengalami ledakan jumlah penduduk yang sangat tinggi. Provinsi tersebut yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur (www.okezone.com). Hal tersebut diungkapkan oleh Sudibyo selaku Kepala BKKBN sebagai berikut:

"10 provinsi penyangga itu, ledakan penduduknya sangat besar. Kalau terlenu akan habis Indonesia," ungkap Sudibyo kepada wartawan di Hotel Grand Inna Muara, Padang, Senin (8/4/2013).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sumatera Utara sendiri diketahui ada peningkatan jumlah penduduk dari 12.834.371 jiwa pada tahun 2007 menjadi 13.042.317 jiwa pada tahun 2008, selanjutnya terjadi peningkatan pada tahun 2009 menjadi 13.248.386. Hal tersebut juga dapat terlihat

dari laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2007 sebesar 1,56%, pada periode 2000-2008 sebesar 1,57%, dan pada periode 2000-2009 sebesar 1,57% (BPS, 2010).

Program kependudukan di Sumatera Utara seperti halnya di daerah Indonesia lainnya meliputi pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian bayi dan anak, perpanjangan usia harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang terus ditingkatkan.

Program Keluarga Berencana (KB) Nasional merupakan program pembangunan sosial dasar yang sangat penting artinya bagi pembangunan nasional dan kemajuan bangsa. Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1992 Pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa KB adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan “Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera” (www.hukumonline.com)

Selama ini yang ada dalam pemikiran masyarakat bahwa ber-KB merupakan masalah wanita/ibu saja. Padahal disadari banyak keluhan dari para ibu yang tidak cocok menggunakan salah satu alat kontrasepsi yang berdampak gemuk, pusing dan keluhan kesehatan lainnya. Dengan demikian sangat diperlukan peran serta yang aktif dari pasangan-pasangan tersebut baik istri maupun suami.

Keikutsertaan suami/pria dalam program KB di Indonesia sangat diperlukan karena biasanya suami lebih dominan sebagai penentu kebijaksanaan